

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 18
TENTANG PENYEDIAAN HAK AKSESIBILITAS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**FITRI YAINI
NPM. 1521020275**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 18
TENTANG PENYEDIAAN HAK AKSESIBILITAS
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**FITRI YAINI
NPM. 1521020275**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumeidi Ja'far, S. Ag., MH.

Pembimbing II : Eti Karini, S. H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Penyandang disabilitas atau difabel memiliki penyediaan hak aksesibilitas yang sama dengan yang lain sebagaimana diterangkan Pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam Pasal 18 yang meliputi yaitu hak: “Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan Untuk Mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk memeriksa objek yang akan diteliti. Metode analisis data yang dilakukan yaitu secara *Kualitatif* yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat yang terjadi dalam masyarakat atau bersifat Deskriptif Analitis. Sumber data penelitian menggunakan data primer, jumlah populasi dalam Penelitian ini adalah 139 orang dan mengambil 10 orang sebagai sampel yang mewakili atau pihak yang bersangkutan, dan hal ini dipilih dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, kemudian metode wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Pengolahan data menggunakan *editing*, dan Sistematis data.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Provinsi Lampung, sesuai dengan isi Pasal 18 dalam pemanfaatan aksesibilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak dalam aksesibilitas bagi setiap individu. Sudah terimplementasi atau terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya atau maksimal. Sedangkan, dalam Pandangan Hukum Islam Implementasi hak penyandang disabilitas sudah terimplementasi atau sudah terlaksana namun belum sepenuhnya/maksimal.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yaini
NPM : 1521020275
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 18 TENTANG PENYEDIAAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Januari 2020
Penulis,

Materai Rp.6000,-

Fitri Yaini
Npm. 1521020275



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Letkol.H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 18
TENTANG PENYEDIAAN HAK AKSESIBILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Sekolah Luar
Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)**

**Nama : Fitri Yaini
NPM : 1521020275
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. A. Khumeidi Ja'far, S. Ag., MH.
NIP. 197208262003121002**

**Eti Karini, S. H., M. Hum.
NIP. 197308162003122003**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

**Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PASAL 18 TENTANG PENYEDIAAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)**” disusun oleh, Nama : Fitri Yaini, NPM : 1521020275, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Pada Hari/tanggal: Kamis, 30 Januari 2020.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. ()

Sekretaris : Erik R Gumeri, M.H. ()

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H. ()

Penguji I : Dr. H. A. Khumeidi Ja’far, S. Ag., MH. ()

Penguji II : Eti Karini, S. H., M. Hum. ()

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.19621022 1993031002**

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْ أَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِأَلْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹

(QS. An-nisa (4) : 58)



¹ Departemen Agama , *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, h. 128

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur dan bangga yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberi makna yang mendalam pada perjalanan hidupku:

1. Ayahanda M. Zulhapi dan Ibunda Khoirani, yang selalu berdo'a, berjuang untuk keberhasilanku memberi cinta dan kasih sayang serta mendidikku sehingga tahu artinya hidup dan bagaimana harus bersikap. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejujung kuku pundapat membalas perjuangan kalian tetapi, penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua serta sedikit membayar lelah dan letih atas perjuangan kalian.
2. Kakak-kakak kesayanganku, Ena Susanti, S.Pd.I, dan Septa Imroni, S.E, yang selalu memotivasiku untuk tetap tegar dan sabar dalam menyelesaikan skripsi serta terimakasih atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya.
3. Adik-adik kesayanganku, Muhroni, Yulia Tantri, Satria Rahman, dan Dela Novia Guntari, terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta semangat kalian yang telah menjadi bara api dalam diri c'ngah, dan mudah-mudahan kelak dapat mengikuti langkah-langkah dari c'ngah untuk adik-adikku. Bahkan harus lebih baik dari c'ngah, Amin.
4. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung, yang selalu menemani dalam mencapai keberhasilanku dan tempatku menuntut Ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi bernama adinda Fitri Yaini, dikenal dengan sapaan Fitri atau Upik, dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1997 di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, anak ketiga dari tujuh bersaudara buah hati dari pasangan Bapak M. Zulhapi dengan Ibu Khoirani, S.Pd.

Riwayat Pendidikan :

1. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK), di Desa Bambang Pagar Dalam Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai serta berijazah pada tahun 2003.
2. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Bambang, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai serta berijazah pada tahun 2009.
3. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Islamiyah (MTSI) di Pugung Tampak, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai serta berijazah pada tahun 2012.
4. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan selesai serta berijazah pada tahun 2015.
5. Penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2015 terdaftar sebagai Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan satu kesatuan atau persatuan.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syariah Uiversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang kreatif dan aktif.
3. Franki, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Siyasa Syar'iiyyah, UIN Raden Intan Lampung yang senanti sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan serta memotivasi mahasiswa dalam kemandirian atau berkualitas.

4. Dr. H. A. Khumeidi Ja'far, S. Ag., M.H, Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan sangat arif dan bijaksana.
5. Eti Karini, S. H., M. Hum, Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
6. Dosen atau Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membina dengan tulus dan ikhlas selama menuntut Ilmu.
7. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung, Khususnya Fakultas Syariah serta jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
8. Endin, S. Pd., M.M.Pd. Sebagai kepala sekolah pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan segenap dewan guru atau staff karyawan lainnnya, yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data.
9. Mbak-mbakku, Ani Lestari, S. Pd, Dewi Pakian Ratih, S. Pd, Rita Noviyanti, S. P, yang memotivasi dan terimakasih untuk do'a dan semangatnya.
10. Teman-teman seperjuanganku "Reni, Devi, Afrilia Netalisya R,Ella Nofita Sari, Permata Septa Ria, Delva Jariah, Irma Asmah, Desi Tamara, Khusnul, Meri, Istikhorro, Kartika, dan Enda" dan teman-teman angkatan 2015 khususnya Siyasah C yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memotivasi saya dalam segala hal.

11. Keluarga besar KKN 284, 285 dan Universitas Darmajaya di Desa Waringin Sari Barat, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang telah menemani kurang lebih selama 40 hari.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun, tidak ada kata lain yang bisa diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bantuan dan amal baik yang mereka berikan kepada penulis akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 30 Januari 2020

Penulis,

FITRI YAINI

Npm. 1521020275



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Fokus Penelitian	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian	12
G. Signifikasi Penelitian	13
H. Metode Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas	21
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	21
2. Ragam Penyandang Disabilitas	23
3. Penyandang Disabilitas dan Klasifikasinya	26
4. Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas	35
B. Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam	44
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam	44
2. Fiqh Siyasah (<i>Dusturiyah</i>)	48
3. Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam	51

C. Tinjauan Pustaka	58
---------------------------	----

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa (SLB)	63
1. Sejarah Singkat Berdirinya	63
2. Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa (SLB)	64
3. Tujuan dan Program Sekolah Luar Biasa (SLB)	65
4. Jumlah Pendidik, Pegawai Lainnya dan Peserta Didik	66
B. Pelaksanaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sekolah Luar Biasa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	68

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	80
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tenaga Pendidikan Atau Karyawan.....	67
Tabel 2. Jumlah Keseluruhan Siswa.....	68
Tabel 3. Fasilitas Sekolah.....	70



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan cerminan dari pada isi skripsi, sehingga untuk memudahkan dalam mempersatukan persepsi pada pembaca dalam memahami isi skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung)**”. Maka peneliti akan mempertegas kata yang dianggap penting yaitu sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya, untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.²
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT., dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, yang diakui dan di yakini serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³ Ada juga Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari/dan menjadi bagian Agama

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58.

³Ngainin Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: Teras, 2009), h.16.

Islam.⁴ Sebagai sebuah sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci, antara lain *ḥukm*, *ḥukm* dan *aḥkām*, *syarī'ah* atau *syarī'at*, *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dan penerapan suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.
4. Undang-Undang adalah suatu ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh Pemerintahan (Menteri, Badan Eksekutif), dan disahkan oleh Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif), ditanda tangani oleh (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja) dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Hak Aksesibilitas adalah salah satu hak-hak bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.⁵
6. Penyandang Disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan

⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 42-43.

⁵Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, h. 3.

fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁶ Disabilitas dari kata bahasa Inggris, yakni *disability* (jamak:*disabilities*) yang berarti ketidakmampuan. Sedangkan dalam Internasional istilah yang sering digunakan adalah *disability*. Orang-orangnya disebut dengan *persons with disabilities*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang cacat atau tidak mampu.⁸

7. SLB PKK Provinsi Lampung adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di Jl. H. Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Merupakan singkatan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau Program Kesejahteraan Keluarga sedangkan dalam logo ialah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu salah satu lembaga Pendidikan khusus swasta satu-satunya, Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu pada Provinsi Lampung di bawah naungan PKK Provinsi Lampung dan diprakarsai oleh Ibu-ibu PKK Propinsi Lampung sejak tanggal 2 Desember 1982 di atas tanah seluas 2 hektar hak guna

⁶*Ibid.*, h. 2.

⁷Arni Surwanti dkk, *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke-Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 40.

pakai dari Pemda Propinsi Lampung yang dibangun sekolah luar biasa dan diberi nama SLB PKK Propinsi Lampung.⁹

Berdasarkan pemaparan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan/pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” adalah suatu upaya guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Atau suatu pemenuhan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam memenuhi aksesibilitas atau akses suatu sarana prasarana pendidikan dan untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan untuk memiliki peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik yakni aksesibilitas fisik maupun non fisik. Dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan tersedianya pelayanan publik atau adanya akses suatu sarana prasarana sekolah yang bersifat aksibel sehingga penyandang disabilitas nantinya akan sangat mudah untuk mengakses atau menggunakan sarana yang ada untuk menggapai atau menempuh sesuatu.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik sehingga peneliti tertarik membahas atau memilih judul ini ialah:

⁹Propil-slb-pkk-propLampung, 2019-07-08 diambil pukul 10 : 15 WIB.

1. Alasan Objektif

- a. Kajian tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih perlu dibahas karena guna mewujudkan kesamaan kesempatan¹⁰ antar masyarakat dan individu-individu lainnya. Atau adanya pemenuhan dan pemanfaatan layanan publik suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan bagaimana Penyandang Disabilitas ditinjau dalam pandangan hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyar'ahan khususnya sesuai dengan Jurusan Siyash Syar'iyah atau Hukum Tata Negara.
- b. Tersedianya literatur-literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang

Disabilitas berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti ketidak mampuan. Orang-orang berkebutuhan khusus juga disebut dengan istilah “Disabilitas” dalam istilah Internasional,

¹⁰Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, h.3.

yang sering digunakan adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan *persons with disabilities*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.¹¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang cacat atau tidak mampu.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Berdasarkan kesamaan hak atau seseorang berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang setara dan sama dengan masyarakat non disabilitas. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlakuan khusus yang di maksudkan merupakan sebuah bentuk perlindungan, penghormatan terhadap terpenuhnya hak asasi manusia.¹³ Hak asasi manusia sering didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan

¹¹Arni Surwanti dkk, *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 40.

¹³Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 273.

sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.¹⁴

Kata “setiap orang” pada kalimat di atas dimaksudkan untuk orang normal maupun orang disabilitas yang wajib dipenuhi hak-hak dasarnya.¹⁵ Penyandang disabilitas kesulitan dalam hal mengakses pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, karena minimnya aksesibilitas pendukung bagi kaum disabilitas pada tempat-tempat pelayanan publik tersebut. Kedudukan dan hak terhadap kaum disabilitas dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Cacat) yang mempertegas Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedudukan hak dan kewajiban serta peranan yang sama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya.¹⁶ Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan disabilitas, diantaranya orang yang sudah menjadi disabilitas sejak mereka lahir, dan ada juga orang yang menjadi disabilitas karena suatu peristiwa yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan salah satu organ tubuhnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya orang normal lainnya. Yang termasuk anak luar biasa antara lain anak yang mengalami gangguan penglihatan yang disebut

¹⁴Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, h. 9-10.

¹⁶Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII: Yogyakarta, 2012, h 35-36.

tunanetra, gangguan pendengaran disebut tunarungu, gangguan pada kecerdasan disebut tunagrahita, gangguan pada anggota tubuh disebut tunadaksa, gangguan pada emosi dan adaptasi sosial disebut tunalaras. Anak-anak yang memiliki bakat khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau *gifted*.¹⁷

Penyandang disabilitas memiliki penyediaan hak aksesibilitas yang sama dalam pemanfaatan dan layaknya dengan yang lainnya sebagaimana diterangkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam Pasal 18 yang meliputi hak yaitu: “Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.”¹⁸

Aksesibilitas sudah seharusnya dimiliki pada setiap fasilitas pelayanan publik sekolah atau gedung pelayanan publik guna memudahkan para difabel untuk melakukan aktivitas pelayanan publik.¹⁹ Salah satunya pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, proses belajar dan mengajar juga sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Suatu sistem pendidikan yang berhasil dan berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup suatu bangsa.

¹⁷Melalui edt.repository.ugm.co.id atau S1-2014-296613-introduction.pdf. Diakses pada tanggal 2 April 2019, Jam 22 : 05 WIB

¹⁸ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, h. 16.

¹⁹Lijan Poltak Sinambela, et.al, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*, Jakarta : Pt. Bumi AKsara, 2010, h.7.

Berdasarkan hal itu maka sangat dibutuhkan tersedianya akses dalam pelayanan publik atau sekolah yang bersifat aksibel sehingga penyandang disabilitas nantinya sangat mudah atau efektif untuk mengaksesnya. Salah satu surat dalam Al-Qur'an adalah An-Nahl yang artinya lebah, ayat 68-69 yang menunjukkan pentingnya akses atau sarana alat dalam pendidikan.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ آلِ جِبَالٍ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ٦٨ ثُمَّ

كُلِّي مِنَ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْئَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ ۚ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٦٩

Artinya : “Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia".“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan” (QS. An-Nahl: Ayat 68-69).²⁰

Bahwa ayat di atas lebih menjelaskan lebah bisa menjadi alat bantu atau sarana bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah Swt. yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub) seorang hamba kepada Allah Swt. Dalam Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr* yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau

²⁰Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bogor :Sigma, 2007, h. 274

mempunyai uzur. Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Provinsi Lampung ini terdapat proses pendidikannya diperuntukkan bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus meliputi kelainan tunarungu (wicara) dan terbelakang mental (tunagrahita).

Dari hasil pra-survey penulis di SLB PKK Provinsi Lampung, maka dapat penulis kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sarana Sekolah

a. Sarana Perpustakaan

Dengan dilengkapi adanya perpustakaan peserta didik tidak akan kesulitan dalam belajar membaca ataupun yang lainnya, buku-buku yang diperlukan peserta didik sudah tersediakan, peserta didik bisa membaca dan meminjam selama satu minggu batas pengembaliannya.

b. Sarana Ibadah

Di SLB PKK Provinsi Lampung ini telah disediakan tempat Ibadah yaitu musholla kecil, yang dimana siswa-siswinya harus di tuntut untuk selalu mengerjakan Ibadah sholat dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Jumlah Peserta didik

Keseluruhan Jumlah peserta didik tingkat SDLB 107 orang, SMPLB 57 orang, dan SMALB 82 orang pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2019/2020 sebanyak 246 orang. Peserta didik terdiri dari 132 peserta didik laki-laki dan 114

perempuan. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi 13 kelas untuk tunarungu dan 19 kelas untuk tunagrahita, jumlah keseluruhannya ada 32 kelas.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih tempat penelitian di Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, untuk mengetahui permasalahan tentang akses anak berkebutuhan khusus atau disabilitas bagi anak tunarungu (wicara). Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut gambaran yang sebenarnya tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan supaya pembahasan mengenai penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada “Implementasi Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas” serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam Pandangan Hukum Islam, Studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” lebih khususnya lagi bagi Hak Penyandang disabilitas yaitu tunarungu (wicara) yang ada pada sekolahan tersebut .

E. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang, yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung?



F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung?
2. Untuk Mengetahui Pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada Sekolah Luar Biasa

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung?

G. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka signifikansi atau manfaat, serta kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi atau kegunaan secara teoritis yaitu sebagai bentuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk bisa mengetahui permasalahan yang ada dalam hukum Islam terhadap Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah terutama untuk mengetahui hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Kegunaan praktis sebagai berikut :
 - a. Bagi para penyandang disabilitas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi penyandang disabilitas. Agar para penyandang disabilitas mengetahui, mempejuangkan dan memperoleh hak aksesibilitas mereka secara layak.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan hak seperti masyarakat dan warga negara pada umumnya.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang diperoleh selama kuliah serta memberikan dan menambahkan wawasan kepada penulis terkait dengan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun

2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan juga untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian di laksanakan.²¹ Metode yang digunakan adalah metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.²²

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Atau bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang

²¹Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

²²*Ibid.*, h. 10

menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.²³

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.²⁴
- b. Data Sekunder merupakan sumber-sumber data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Dalam hal ini buku atau artikel serta pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini atau dapat diambil dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data-data dengan membaca kitab atau Undang-Undang, literatur-literatur, buku-buku referensi, jurnal, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data yang lain yang lebih relevan dan sumber yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Maka metode yang digunakan adalah :

²³Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya 2014), hal. 126

²⁴Rosady Ruslan, “*Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 29.

- a. Metode Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian dan perilaku suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.²⁵ Metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁶
- b. Metode *Interview* (Wawancara) adalah teknik pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung maupun tertulis oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁷ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat fleksibel, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di rubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi.

²⁵ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 114.

²⁶ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN 2008), hal. 70.

²⁷ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 107.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku atau untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah penelitian.

4. Populasi dan Sample

- a. Populasi (sasaran) adalah wilayah generalisasi yang terdiri: dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁹ Populasi dalam penelitian adalah guru atau karyawan Sekolah Luar Biasa Pembinaan/pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (SLB PKK) berjumlah 50 orang dan siswa-siswi khusus tunarungu sebanyak 89 orang, sehingga keseluruhan populasi berjumlah 139 orang.
- b. Sampel dan Teknik sampling. Sampel adalah sebagian subjek dari populasi.³⁰ Sedangkan teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel suatu populasi. Dengan demikian berarti teknik sampling

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, h. 198.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung, Alfa beta, 2013), h. 117.

³⁰*Ibid*, h. 119.

merupakan teknik yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menentukan dan menetapkan sampel penelitian berdasarkan populasi yang ada. Metode sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel yang ditujukan kepada responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat memberikan keterangan yang mengarah serta memperoleh data yang faktual.³¹ Keseluruhan jumlah sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 10 orang dari 139 orang, meliputi kepala sekolah (1 orang), wakil kepala sekolah (1 orang), waka sarana prasarana (1 orang), guru (3 orang), dan siswa-siswi (4 orang) pada SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau Khusus penyandang disabilitas Tunarungu atau Wicara), yang dianggap lebih tahu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi di Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

5. Pengolahan Data

Dalam pengelolaan data terdapat beberapa tahap-tahap pengelolaan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), hal ini dilakukan untuk pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian lapangan maupun studi literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

³¹ Suharsimi Arikunto, h. 109

Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau dapat diperbaiki.

- b. *Sistemating* atau Sistematis Data yaitu untuk melakukan pengecekan terhadap data-data batau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan benturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di dapat secara teratur atau edit dan diberi tanda menurut khlasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari siswa-siswi, para staf atau guru, dan kepala sekolah atau orang yang mewakili Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilihat dari sudut pandang Undang-Undang dan hukum Islam nya. Kemudian

mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan berpikir menggunakan Metode *deduktif* yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci. Berasal dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyandang diartikan dengan orang cacat atau ketidak mampuan.³² Disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti ketidak mampuan. Penyandang disabilitas dalam Internasional, istilah yang sering digunakan adalah *disability*. Orang-orang disebut dengan *Persons with disabilities*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.³³

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang didalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke Empat, (Jakarta : Gramedia, 2008), h. 40.

³³Arni Surwanti, dkk. *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, (Yogyakarta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23.

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 1 Ayat (1) bahwa “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.³⁵ Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bertujuan agar penyandang disabilitas menjadi mandiri, dan terwujudnya keadilan hukum bagi penyandang disabilitas baik perdata, pidana, maupun tatanegara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas setiap disabilitas di negara Indonesia memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Dari penjelasan di atas bahwa penyandang disabilitas harus dijaga dan diperlakukan dengan baik karena mereka mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

³⁴Ari Pratiwi dkk , *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang : Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, 2016, h. 15.

³⁵ Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, h. 2.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Istilah disabilitas digunakan dalam konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas atau dalam bahasa Inggris *with disability* yang diartikan dengan keterbatasan diri yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, dan/atau beberapa kombinasi.³⁶

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Ragam atau jenis-jenis setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk berkembang secara baik. Adapun Jenis-Jenis penyandang disabilitas antara lain:

a. Disabilitas Mental

- 1) Mental Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat Intelektual.

Dimana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas.

- 2) Mental Rendah, atau kapasitas Intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*)

di bawah rata-rata yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) adalah anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70an dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

³⁶Melalui<<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Difabel>>diakses pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 22:00 WIB.

3) Kesulitan dalam belajar Spesifik, yang bersangkutan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang didapat.³⁷

b. Disabilitas Fisik yaitu :

1) Tunadaksa atau cacat tubuh adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang di sebabkan oleh kelainan/cacat neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit/akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

2) Tunanetra/cacat indera penglihatan adalah individu yang memiliki hambatan dalam indera penglihatan. Tunanetra dapat di klasifikasikan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.

3) Tunarungu atau gangguan pendengaran adalah individu yang memiliki hambatan dalam gangguan pendengaran baik secara permanen maupun tidak permanen. Karena adanya hambatan dalam sistem pendengarannya terjadilah komplikasi dalam hambatan berbicara yang disebut dengan tunawicara.³⁸

4) Tunawicara adalah individu yang memiliki gangguan dalam berbicara atau adanya penyebab dari ketunarunguan atau adanya gangguan pada organ motoriknya sehingga menyebabkan tidak dapat berbicara dalam bahasa verbal/ tidak mudah dimengerti saat berbicara.

³⁷ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 17.

³⁸ *Ibid.*, h. 18.

Berdasarkan Pasal 4 ragam atau jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu antara lain,³⁹ *Pertama*: Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Kedua*: Penyandang disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. *Ketiga*: Penyandang disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. *Keempat*: Penyandang disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Terdapat tiga macam penyandang disabilitas yaitu, *Pertama*: kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungtu, dan tunarungtu wicara. *Kedua*: kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*: kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

³⁹ Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, h. 6-7.

Terdapat penyandang disabilitas ganda atau multi yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.⁴⁰ Baik penyandang disabilitas fisik, mental ataupun ganda memiliki hak yang sama. Anak-anak yang memiliki bakat khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau *gifted*.⁴¹

Kesimpulan dari ragam disabilitas yaitu: Tunanetra (tidak dapat melihat), Tunarungu (tidak dapat mendengar, kurang dapat mendengar atau tuli), Tunagrahita (cacat pikiran, lemah daya tangkap), Tunadaksa (cacat tubuh), Tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan social), Tunaganda (Penderita cacat lebih dari satu kecacatan), Tunawicara (tidak dapat bicara, bisu dan gangguan komunikasi).⁴²

3. Penyandang Disabilitas dan Klasifikasinya

Berikut berbagai ragam anak penyandang disabilitas dan klasifikasi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil Pra-Survey penyandang disabilitas yang terdapat pada sekolah luar biasa (SLB) Pembinaan

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 4 pada penjelasan ayat (2), h. 5.

⁴¹ Melalui edt. repository. ugm. ac. id atau S1-2014-296613-introduction.pdf. Diakses Pada tanggal 2 April 2019, Jam 22 : 05 WIB.

⁴² Ratih Putri Pratiwi, “Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus”, h. 14.

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, yang meliputi :

a. Tunarungu (Wicara)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tunarungu adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indra pendengaran. Secara etimologis, tunarungu berasal dari kata 'tuna' dan 'rungu'. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi, orang yang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Tunarungu adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seorang individu kehilangan fungsi pendengaran sepenuhnya atau sebagian.⁴³

Anak tunarungu tidak hanya gangguan pendengarannya saja yang menjadi kekurangannya, kemampuan berbicara seseorang dipengaruhi seberapa sering ia mendengarkan pembicaraan, namun dikarenakan anak tunarungu tidak bisa mendengarkan apapun sehingga dia sulit mengeti percakapan yang dilakukan oleh orang lain, maka dari itu mereka harus menggunakan Alat Bantu Dengar (ABD) yang dapat membantu proses informasi bahasa atau suara melalui pendengaran atau menggunakan bahasa isyarat.

⁴³Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif*, Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005, h. 33.

Tunarungu (Wicara) berarti akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik yang disebabkan oleh kelahiran, dan kecelakaan maupun penyakit. Tunarungu wicara terdiri dari Tunarungu dan Tunawicara, kelainan pendengaran (tunarungu) adalah istilah yang menunjukkan ketidak mampuan mendengar yang rentang-nya dari yang ringan hingga berat, meliputi tuli dan agak tuli atau susah mendengar. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: menyeluruh/tuli (*deaf*) dan sebagian/kurang dengar (*low of hearing*).⁴⁴

Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*).⁴⁵

Tingkat ketajaman pendengaran dapat diketahui dengan “tes audiometris”. Klasifikasi Tunarungu (wicara) dalam kelainan pendengaran dan wicara dalam percakapan sehari-hari di masyarakat awam sering diasumsikan sebagai orang tidak mendengar sama sekali atau tuli. Dikutif dari program khusus tunarungu oleh Kemendiknas bahwa menurut Boothroyd tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga kelompok, yaitu:

⁴⁴ Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta : PALASTREN, Vol. 8, no.2, 2015), h. 305.

⁴⁵ Kementerian Pendidikan Nasional, 2005, h. 48.

1) Berdasarkan tempat terjadinya kehilangan:

- a) Kerusakan pada bagian tengah dan luar telinga sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk kedalam telinga disebut telinga konduktif.
- b) Kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otot yang menyebabkan tuli sensoris.⁴⁶

2) Berdasarkan saat terjadinya kehilangan yaitu :

- a) Tunarungu bawaan artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau menyandang tunarungu dan indra pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi.
- b) Tunarungu setelah lahir artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir yang diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit.

3) Berdasarkan taraf penguasaan bahasa yaitu :

- a) Tuli pra bahasa (*Prelingually Deaf*) adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa (usia 1-6 tahun) artinya anak menyamakan tanda (signal) tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan lain-lainnya namun belum membentuk sistem lambang.
- b) Tuli purna bahasa (*Post Lingually Deaf*) adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan.⁴⁷

⁴⁶Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, (Yogyakarta : Javalitera, 2012), h. 18.

⁴⁷ Ibid., h. 19.

Disabilitas pendengaran, yang dialami sejak lahir sering kali menyebabkan gangguan pada bicara disebut “tunawicara”. Tunawicara adalah kesulitan berbicara yang disebabkan tidak befungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit, dan pita suara. Tunawicara dapat dikategorikan yaitu, *Pertama*: ringan atau masih dapat berkomunikasi dengan baik, hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengar langsung sehingga pemahaman mereka menjadi sedikit menghambat. *Kedua*: sedang atau sudah mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. *Ketiga*: berat atau parah, sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk biasanya kalau masuk dalam kategori ini sudah menggunakan alat-alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan membaca gerak bibir, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi.⁴⁸

Hal ini dapat di dasarkan pada anggapan bahwa kelainan pendengaran dapat mengurangi fungsi pendengaran. Namun demikian, perlu di pahami bahwa kelainan pendengaran dapat dilihat dari derajat atau ketajamannya untuk mendengar dapat dikelompokkan dalam beberapa jenjang. Ketajaman pendengaran seseorang diukur dan dinyatakan dalam satuan bunyi deci-Bell (db). Penggunaan satuan tersebut untuk membantu dalam

⁴⁸ *Ibid.*, h. 20

interpretasi hasil tes pendengaran dan pengelompokkan dalam jenjangnya.

Beberapa pengertian tunarungu di atas merupakan pengertian yang termasuk kompleks, sehingga dapat disimpulkan bahwa tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan dalam pendengarannya, baik secara keseluruhan ataupun masih memiliki sisa pendengaran. Meskipun anak tunarungu sudah diberikan alat bantu dengar, tetap saja anak tunarungu masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Dalam konteks pendidikan, tunarungu diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, gangguan pendengaran ringan, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 35-54 db. Pada tahap ini penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus. *Kedua*, gangguan pendengaran sedang, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 55-69 db. Pada tahap ini penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, karena penyandang memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus setiap harinya. *Ketiga*, gangguan pendengaran berat, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 70-89 db. Pada tahap ini penderita membutuhkan pelayanan sekolah khusus karena memerlukan latihan berbicara dan latihan berbahasa secara khusus. *Keempat*, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 90 db ke atas dan penderita memerlukan pelayanan sekolah khusus karena memerlukan latihan berbicara dan latihan berbahasa secara khusus.

Perkembangan kognitif pada anak tunarungu ditentukan oleh: *pertama*, tingkat kemampuan bahasa. *kedua*, oleh variasi pengalaman. *ketiga*, oleh pola asuh/atau kontrol lingkungan. *keempat*, oleh tingkat ketunarunguan dan bagian telinga yang mengalami kerusakan, dan *kelima*, oleh ada tidaknya kecacatan lainnya.

b. Tunagrahita

Anak-anak memiliki kelemahan dalam berfikir dan bernalar. Akibatnya dari kelemahan-nya tersebut anak tunagrahita memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi sosial di bawah rata-rata. Istilah resminya di Indonesia disebut anak tunagrahita.

Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan yang dikenal retardasi mental (*mentally retarded*). Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangan. Biasanya orang tua adalah pihak yang pertama kali menyadari perkembangan anak yang berbeda dari anak lainnya salah satunya yaitu dilihat dari tingkat kecerdasan anak yang rendah pada taraf belajar anak yang sering lambat. Tingkat kecerdasan rendah memang sedikit lebih kesulitan dalam menempatkan diri sebagai anak dilingkungan masyarakat dan sekitar.⁴⁹

⁴⁹Marieke Nijland, dkk, "*Anak Unik Informasi tentang Anak-anak Tunagrahita*", Yogyakarta : Kanwa, 2007, h. 7

Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dan mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.

Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator yaitu, keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata, ketidak mampuan dalam perilaku sosial/adaptif, dan hambatan perilaku sosial/adaptif terjadi pada usia perkembangan yaitu sampai dengan usia 16 tahun. Ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita yaitu Penampilan fisik tidak seimbang, Tidak ada/kurang perhatiannya terhadap lingkungan, Koordinasi gerak kurang (gerakan sering tidak terkendali).

Kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita yakni perbedaan tunagrahita dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Perbedaan karakteristik belajar anak tunagrahita dengan anak sebayanya, anak tunagrahita mengalami masalah dalam hal yaitu tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah, melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru, minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas.⁵⁰ Klasifikasi anak Tunagrahita dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵⁰ Dudi Gunawan, "Modul Guru Pembelajaran SLB Tunarungu Kelompok Kompetensi A", (Jakarta: 2016), h.11

1) Tunagrahita Ringan (mampu didik)

Anak yang tergolong dalam tunagrahita ringan memiliki banyak kelebihan dan kemampuan. Tingkat kecerdasannya/IQ mereka berkisar 50-70 mempunyaikemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan seni trampil dan pekerjaan sederhana. Mereka mampu di didik dan dilatih seperti, membaca, berhitung, dan menjahit. Tunagrahita ringan lebih mudah diajak berkomunikasi. Karena itu anak tunagrahita ringan tidak memerlukan pengawasan ekstra.⁵¹

2) Tunagrahita Sedang (mampu di latih)

Tingkat kecerdasan IQ berkisar 30-50 dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional, mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri (*self-help*), mampu mengadakan adaptasi sosial dilingkungan terdekat, mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan.

3) Tunagrahita Berat dan Sangat Berat (mampu rawat)

Tingkat kecerdasan IQ mereka kurang dari 30 hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri. Ada yang masih

⁵¹ Nunung Aprianto, “*Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*”, (Yogyakarta : Java litera, 2012), h. 36.

mampu dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sangat terbatas.

4. Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang benar atau milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat.⁵²

Aksesibilitas merupakan sebuah infrastruktur pada suatu bangunan hal yang paling penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan semua orang yang ada di dalamnya tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Mereka yang memiliki kekurangan didalam mobilisasi dan memerlukan alat bantu seperti tongkat, braces, frames, bahkan kursiroda sangat kurangnya bilamana sebuah sarana dan prasarana didalam bangunan tidak memenuhi kriteria persyaratan aksesibilitas-nya pendekatan yang selama ini kita temui dalam realitas di masyarakat.

Masih ada pengucilan dan anggapan melihat penyandang cacat dengan rasa “belas kasihan”, tidak memposisikan bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Bukanlah sebuah sikap “belas kasihan namun pengakuan dan pemenuhan atas hak yang seharusnya mereka dapatkan. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala

⁵²Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), h. 174.

bidang kehidupan di masyarakat.⁵³ Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non-fisik, bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktivis organisasi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak setiap manusia selain disepakati dalam berbagai konferensi yang menghasilkan instrument HAM Internasional juga tidak luput dari campur tangan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak dengan meratifikasi berbagai Instrument HAM Internasional khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, membentuk instrument hukum nasional hingga pada tingkat daerah serta melihat kebijakan negara-negara lainnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non-fisik bagi penyandang disabilitas, telah sering disuarakan oleh para aktivis organisasi penyandang disabilitas (*Disabled People Organisation*). Sebagian hak sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah, seperti pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya fasilitas-fasilitas di beberapa gedung seperti musholla, toilet, lapangan upacara, tempat transportasi khusus disabilitas dan sebagainya walaupun

⁵³Prajalani, Yuniviana, dkk., *Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo*. Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS). 2017: Vol. 04(02), h. 88-89.

masih minim dan kadang tidak terurus.⁵⁴ Daerah juga didorong untuk menyediakan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas khususnya kelompok usia sekolah serta disediakan regulasi yang mencukupi seperti dengan peraturan daerah (Perda).

Dorongan bagi dalam lingkup pemerintahan di daerah belum banyak tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan perlindungan yang dimaksud salah satu hak aksesibilitas. Suatu perlindungan yang mencakup seluruh hak yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum, yang sering disebut aksesibilitas. Pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan pendidikan serta informasi dan komunikasi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa: “Aksesibilitas adalah kemudahan yang di sediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan”.⁵⁶ Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk

⁵⁴ Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2., Universitas lampung, Lampung, 2013, h. 236.

⁵⁵ Aprilina Pawestri, “*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*”, h. 166.

⁵⁶ Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang *Penyandang Disabilitas*, h. 3.

menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik. Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan. Sedangkan aksesibilitas non-fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem.

Prinsip aksesibilitas adalah meliputi tiga hal yaitu prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Prinsip kesetaraan bukan berarti persamaan. Para penyandang disabilitas seringkali harus menggunakan fasilitas yang sama yang sering digunakan oleh orang pada umumnya tanpa ada modifikasi. Makna kesetaraan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan agar mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Secara garis besar, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurut kegunaannya dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu, *Pertama* : fasilitas yang bisa digunakan oleh siapa saja tidak hanya penyandang disabilitas yang mempergunakannya, contohnya trotoar, selasar, lift, dsb. *Kedua* : fasilitas yang hanya dipergunakan oleh penyandang disabilitas saja, orang yang tidak menyandang disabilitas tidak boleh mempergunakannya, contohnya ada beberapa fasilitas yang khusus

disediakan untuk penyandang disabilitas yaitu seperti wc, tempat parkir, hidrolik di bus maupun di bangunan sebagai pengganti tangga di gedung bertingkat, jalan dengan kemiringan maksimal 30%, dll.

Berdasarkan Pasal 18 tentang hak aksesibilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi hak⁵⁷: “mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu”.

Tersedianya aksesibilitas bagi difabel dalam melakukan pelayanan publik merupakan pemenuhan dan penghormatan hak-hak difabel serta sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian difabel. Lingkungan sekitar difabel yang mendukung pemenuhan hak difabel sehingga difabel dapat melakukan mobilitas dan beraktifitas merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan potensi serta peranan sosial difabel dalam kehidupan kemasyarakatan dan bernegara.⁵⁸ Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

⁵⁷ *Ibid*, h. 16.

⁵⁸ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, 2011, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1.

Unit Layanan Disabilitas (ULD) adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kewajiban pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangat dijamin oleh undang-undang, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak dijumpai beberapa fasilitas umum yang tidak ramah atau layak bagi penyandang disabilitas. Kondisi seperti ini diperparah dengan penyerobotan maupun pemakaian fasilitas umum untuk kepentingan ekonomi secara pribadi. Masyarakat belum sadar bahwa penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam mobilitasnya.

Hal ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mendukung aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ada di hampir semua aspek kehidupan. Ada beberapa pemangku peran yang bertugas memenuhi atau memproses pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan yaitu sekolah atau yayasan atau lembaga pendidikan di mana penyandang disabilitas sedang menempuh pendidikan, dalam hal ini adalah guru atau para staff karyawan serta beberapa staff yang bersangkutan dan petugas administrasi pendidikan karena tidak semua akomodasi yang layak dapat dipenuhi oleh

sekolah, terutama sekolah regular dan perguruan tinggi yang menerima siswa penyandang disabilitas.

Adapun diatur di dalam Pasal 40 Ayat 1 yang dimana pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.⁵⁹

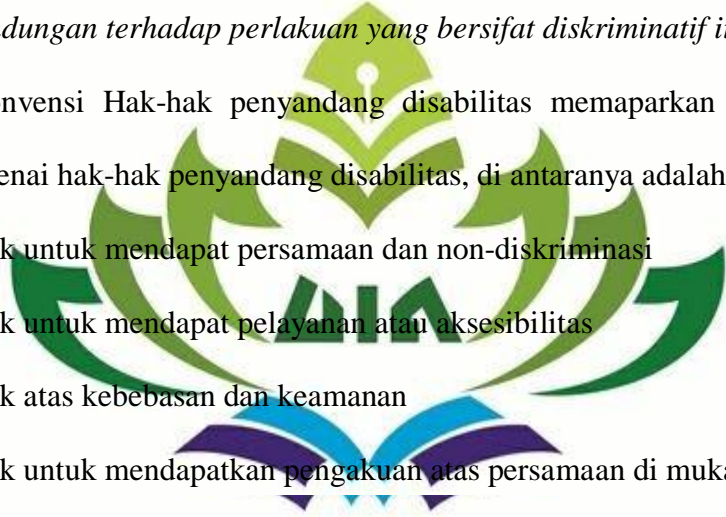
Dalam Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.⁶⁰ Maka, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Undang-undang penyandang disabilitas memandatkan pembentukan unit layanan disabilitas (ULD). Adapun Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

⁵⁹Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta; Kompas, 2010), hal.12

⁶⁰Ibid.,UU No 8 tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*, h. 28.

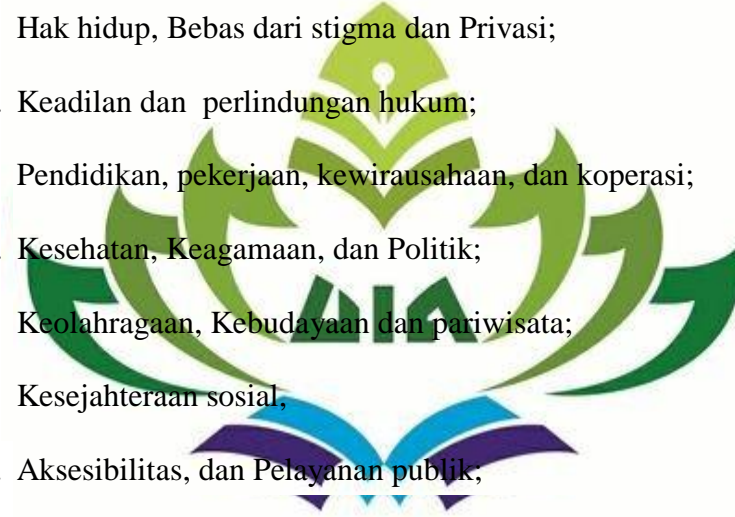
Dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Selanjutnya juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa: *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*⁶¹

Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas memaparkan secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, di antaranya adalah :

- 
- a. Hak untuk mendapat persamaan dan non-diskriminasi
 - b. Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas
 - a. Hak atas kebebasan dan keamanan
 - b. Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum
 - c. Hak untuk mendapat keadilan
 - d. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan
 - e. Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam
 - f. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan
 - g. Hak atas pendidikan dan kesehatan.
 - h. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja

⁶¹Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Disabilitas*, 2015, hlm 144-145.

Berdasarkan pernyataan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini terdiri dari 13 (tiga belas) Bab, 153 (seratus lima puluh tiga) Pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak, antara lain:

- 
- a. Hak hidup, Bebas dari stigma dan Privasi;
 - b. Keadilan dan perlindungan hukum;
 - c. Pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - d. Kesehatan, Keagamaan, dan Politik;
 - e. Keolahragaan, Kebudayaan dan pariwisata;
 - f. Kesejahteraan sosial,
 - g. Aksesibilitas, dan Pelayanan publik;
 - h. Perlindungan dari bencana;
 - i. Habbitasi dan rehabilitasi,
 - j. Konsesnsi dan Pendataan;
 - k. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - l. Berekpresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - m. Berpindah tempat dan kewarganegaraan;
 - n. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran,
 - o. Bebas penyiksaan dan eksploitasi.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas membahas terkait akomodasi yang layak sudah terimplementasi atau terlaksana namun belum sepenuhnya atau maksimal.⁶² Namun dalam kenyataannya masih terdapat hak penyandang disabilitas yang diabaikan oleh Pemerintah, salah satunya adalah hak atas pekerjaan dan lapangan kerja, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dimana semua hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar bisa sepenuhnya diwujudkan.

B. Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “Hukum” dan “Islam”, dalam bahasa Arab, kata hukum berasal dari kata “*al-Hukm*” yang berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur’an, yaitu ata benda yang berasal dari kata kerja “*salima*” menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan diri dan kepatuhan.⁶³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.

⁶²Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, 2006, h. 140-152.

⁶³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2013) h. 21.

Dari segi istilah, hukum sebagai peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan perintah dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.⁶⁴ Sebagai sebuah sistem hukum memiliki beberapa istilah yaitu *al-Hukm*, *hukm* dan *ahkam*, *syari'ah* atau *syari'at*, *fiqh* dan lain-lain. Apabila kata 'hukum' dihubungkan dengan "Islam" atau "*Syara*", maka hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁶⁵

Menurut Amir Syarifudin, 'Hukum Islam' berarti "Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam".⁶⁶ Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, hukum Islam adalah firman Allah mengenai tingkah laku orang-orang mukallaf, baik berupa tuntunan (suruhan dan larangan), memilih (berbuat atau tidak) dan menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi suatu hukum.⁶⁷ Hukum Islam, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu oleh para pakar berasal dari kata *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana hukum Barat disebut *Islamic Law*.⁶⁸

⁶⁴M.Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum : Universitas Hasanuddin, 2008, h. 13.

⁶⁵Muhammad Daud Ali, Ibid, h. 42-43.

⁶⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, ctk. Ketiga, Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2008, h. 6.

⁶⁷Ahmad Takwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, Semarang : Walisongo Press, 2009, h. 4.

⁶⁸Zaenudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 1-2.

Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah disebut sebagai syariah dan penjabaran keduanya disebut fiqh. Secara global hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Allah ('iba-dah) yang mencakup peraturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan, hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. Sementara Jinayah (pidana) dan hukum perkawinan (munakahat).⁶⁹

Berkenaan dengan luasnya kajian hukum Islam, maka dalam tahap ini ada beberapa pembidangan hukum Islam. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti Shalat, puasa, Zakat, dan haji. Dengan tata cara menyebut dua kalimat Syahadat adalah cara umat manusia mengenal dan menyakini Allah SWT. Menurut para ulama, bagian ini termasuk fiqh atau yang dinamakan *fiqh al-ibadah*.
- b. Berkaitan dengan perbuatan manusia atau hubungan kerja sama dalam bidang kebendaan seperti masalah jual beli, utang piutang, hak milik,

⁶⁹ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 9.

perjanjian, perseorangan dan sewa-menyewa. Para ulama menyebutnya sebagai *fiqh al-mu'amalah*.

c. Yang berkaitan dengan keluarga seperti nikah, talak, dan rujuk. Menurut ulama yaitu *fiqh al-munakahat* masalah terkait tentang pernikahan yang sah, pergaulan yang baik antara suami-istri, penyelesaian masalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, cerai dan rujuk.

d. Kajian ini membicarakan tentang *fiqh al-mawaris* berbicara masalah siapa yang berhak atau terhalang mendapatkan harta warisan dan berapa bagian ahli warisnya, serta harus mempunyai fungsi yang tepat dan efisien.

e. Yang berkaitan dengan hukum acara diperadilan (*murafa'ah*) dibentuklah institusi peradilan (*al-qadha*) yang bertugas memproses, menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara manusia dengan benar. Ulama menyebutnya sebagai *fiqh al-murafa'ah* atau hukum acara, yang membicarakan masalah etika persidangan, tata cara beracara, dan etika hakim.

f. Kajian *fiqh* lainnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat atau ketatanegaraan. Hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan disebut *Fiqh al-siyasah* yang mengkaji masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lainnya.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, h. 12.

2. Fiqh Siyasah (*Dusturiyah*)

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).

Kata siyasah berasal dari kata 'sasa', berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah (سياسة) istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁷¹

Dari uraian di atas tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam fiqih Islam Sunni, siyasah terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum Islam, *fiqh siyasah* adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada

⁷¹ *Ibid*, h. 4.

khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam,⁷² guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian yaitu : *Siyasah dusturiyah syar'iyah, Siyasah tasyri'iyah syar'iyah, Siyasah qodhoiyah syar'iyah, Siyasah maliyah syar'iyah, Siyasah idariyah syar'iyah, Siyasah khorijiyah syar'iyah atau siyasah dauliyah, Siyasah tanfiedziyah syar'iyah, dan Siyasah harbiyah syar'iyah.*

Adapun hukum Islam (*fiqh siyasah*) yang diambil oleh peneliti yaitu *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara

⁷²Khamami Zada, "*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17.

serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷³ Jadi, Permasalahan di dalam fiqh siyasah *dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah *dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁴ Fiqh siyasah *dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah *dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok :

- a. Dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.
- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

⁷³Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h.177

⁷⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 47

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persolan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
- 3) Bidang *siyasah qadlailah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁷⁵

3. **Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam.⁷⁶ Sebagai sebuah sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci, antara lain *ḥukm*, *ḥukm* dan *aḥkām*, *syarī'ah* atau *syarī'at*, *fiqh* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaan-nya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 48

⁷⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 42-43.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ٤

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”(Q. S. At-Tin ayat 4).

Demikian juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَّا صُورَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, kepada bentuk

rupamu dan hartamu, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalmu” (HR. Bukhari).⁷⁷

Berdasarkan kedua Ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan serta tuntunan agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. ‘Abasa ayat 1-4 menjelaskan sebagai berikut:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۚ ۱ أَنْ جَاءَهُ آلٌ أَصْحَابُ ۚ ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ۚ ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ ۚ ۴
الَّذِكْرُ ۚ ۴

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau ia

⁷⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Muslim* (Daar Ibnu Katsir, 1423 H), h. 420.

(ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya” (QS. ‘Abasa: 1-4).⁷⁸

Asbabun-nuzul turunnya ayat tersebut memecahkan suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam *sirah* (perjalanan hidup) Rasulullah saw. Dalam sejarah Nabi Muhammad saw. tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *asbab an-nuzul* surat ‘Abasa Ayat 1-4, pada tafsir Jalalain, bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra (buta) bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum, dan dalam sumber yang lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah).⁷⁹

Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: “Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu”. Karena buta maka pada saat itu Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu menuju rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa di atas kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau di haruskan lebih memperhatikannya dari pada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, danTajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 585.

⁷⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunya Ayat Al Qur'an*, Cet 1(Jakarta :Gema Insani, 2008) hlm 615.

dan bila menjumpainya langsung menyapa.⁸⁰ Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut. Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya”, lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum.

Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memegang jabatan sebagai walikota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da'i ke Madinah. Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang “*Universal Islamic Declaration of Human Right*” yang diangkat dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain :

- a. Hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kebebasan
- b. Hak atas persamaan kedudukan dan hak untuk mendapatkan keadilan
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan

⁸⁰Al-Mahalli, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 89.

- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan
- e. Hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik
- f. Hak untuk bebas berpikir dan berbicara
- g. Hak untuk bebas memilih agama,
- h. Hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi
- i. Hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, dan hak jaminan sosial
- j. Hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya
- k. Hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, dan
- l. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apapun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki.⁸¹ Manusia memerlukan Ilmu untuk memahami alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu, manusia dapat menyelami dan menggali mistri alam semesta dan menggunakan-nya untuk kebaikan hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam kebaikan di akhirat.

⁸¹Dapat dilihat pada QS. An-Nahl: 78; Az-Zumar: 9; At-Taubah: 122, dan Al-Imran: 18.

Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntutan ilmu. Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan baik. Jika di perhatikan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai penyandang disabilitas, ditemui bahwa Ayat-ayat tersebut justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Surat Abasa Ayat 1 dan 2 misalnya, secara umum berisi teguran atas sikap Rasul Saw. yang tidak ramah terhadap seorang penyandang disabilitas yang datang padanya.⁸² Ayat ini, menjadi dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan dengan tidak memandang tinggi rendahnya status sosial, baik laki-laki, maupun perempuan.

Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut Ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain.⁸³ Amr Ibn Al-Jamuh sudah tua ketika Islam mencapai Madinah. Dia juga sebagian lumpuh di salah satu kakinya. Setelah memeluk Islam, ia merasa kuat dan bergabung dengan ketiga anaknya yang bersiap bertarung di Perang Uhud. Anak anaknya telah mengingatkan bahwa ia dibebaskan dari kewajiban untuk berperang

⁸²Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: ar-Risalah, 2006), h. 69.

⁸³dapat di (lihat QS. *An-Nur*: 61; QS. 'Abasa: 1-4).

karena sudah tua, lemah, dan lumpuh. Amr mengambil kasusnya langsung kepada Nabi yang mengatakan kepada anak-anak untuk membiarkan ayah mereka memiliki keinginannya. Amr dan salah seorang putranya yang dekat dengan Nabi selama pertempuran, mereka membela Nabi ketika hal itu menjadi benar-benar berbahaya, dan mereka jatuh di medan perang dan meninggal dalam saat satu sama lain.

C. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan, yaitu:

1. Skripsi ini berjudul “*Disabilitas dalam Alquran (Studi Terhadap Kajian Tafsir Tematik)*” yang disusun oleh Muhammad Hafiz Nur Program Studi Ilmu Al-Qur'an Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Medan tahun 2018. Al-qur'an terdapat banyak ajaran-ajaran bagi umat Islam, salah satunya kandungan ajaran Al-qur'an yang memandang manusia sama derajat disisi Allah kecuali hanya derajat ketaqwaannya. Indahya bila ajaran tersebut mampu menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat dan begitu juga yang harus dilakukan dengan bermasyarakat dengan orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, tidak memandang mereka sebelah mata dan tidak mendiskriminasi mereka. Orang-orang berkebutuhan khusus disebut juga mereka dengan istilah “Disabilitas” bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang disabilitas menurut Al-Qur'an dan pandangan Al-Qur'an Terhadap

Disabilitas. Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis metode kualitatif dan metode pendekatannya menggunakan penafsiran Al-qur'an dari segi tafsir tematik, pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*), dalam pengolahan data menggunakan metode kualitatif dan dalam analisa data menggunakan tiga metode yaitu deduktif, induktif, dan komparatif.⁸⁴

2. Skripsi yang berjudul: *"Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar"*, yang disusun oleh Muhammad Afdal Karim Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan. Proses perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A), perlindungan diberikan melalui proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penyalahgunaan.

⁸⁴Muhammad Hafiz Nur, *"Disabilitas dalam Alquran (Studi Terhadap Kajian Tafsir Tematik)"*. diakses pada 22 agustus 2019, di jam 14: 22 WIB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 di Kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas di kota Makassar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.⁸⁵

3. Skripsi yang berjudul : “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi*” yang disusun oleh Utomo. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali mereka yang menyandang disabilitas. Saat ini dunia pendidikan telah diperkaya dengan munculnya paradigma pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan peluang kepada seluruh anak bangsa tanpa kecuali untuk mendapatkan pendidikan yang layak ditinjau dari semua sisi. Sangat menarik bagaimana implementasi pendidikan inklusif di pendidikan/ perguruan tinggi, terutama bagaimana mengakomodir mereka yang menyandang disabilitas. Tentunya mereka juga punya hak. Dan perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan terbaiknya. Memberikan kesempatan bagi mereka merupakan sebuah kearifan yang berbasis pendidikan etnopedagogi.⁸⁶

⁸⁵Muhammad Afdal Karim, “*Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar*” diakses pada 24 agustus 2019, di jam 14: 22 WIB.

⁸⁶Utomo, “*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi*”, PLB FKIP UNLAM. diakses pada 4 Februari 2020, di jam 19: 12 WIB.

4. Skripsi dengan judul: *“Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”*, disusun oleh Yoga Maulana Ibrahim⁸⁷. Penyandang disabilitas dengan keberagamannya mempunyai hak-hak yang perlu untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi termasuk hak politik sesuai amanah dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sementara itu, dalam kajian ketatanegaraan Islam terdapat sejumlah teori yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan hak politik. Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat pembahasan mengenai syarat seorang pemimpin harus sehat fisik dan psikisnya. Sehingga seolah-olah membuat penyandang disabilitas tersingkirkan dalam mengakses sumber kekuasaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016; Batas sehat jasmani dan rohani dalam persyaratan calon kepala daerah di Indonesia; dan Analisis Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditinjau dari *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran *siyasah dusturiyah* yakni kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak sipil termasuk di dalamnya hak politik, pengaturan Undang-undang berdasarkan syari’at Islam dan pengaturan yang mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur’an

⁸⁷ Yoga Maulana Ibrahim, *“Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”*, diakses pada 4 Februari 2020, di jam 14: 22 WIB.

dan al-Hadist yang diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Adapun kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis miliki yaitu Persamaan penelitiannya sama-sama membahas hak penyandang disabilitas atau yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu pada pelayanan atau aksesibilitas yang diberikan bagi semua ragam/jenis penyandang disabilitas. Sedangkan, Perbedaan Penelitian ini membahas tentang pola sistem yang diterapkan bagi disabilitas dalam pemanfaatan pelayanan publik atau mengenai hak-hak baik itu hak aksesibilitas, politik, dan dalam perspektif yang berbeda-beda dan berlokasi pada tempat yang berbeda pulaseperti di makassar, UNLAM, Medan dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Provinsi Lampung.

Adapun perbedaannya Penulis lebih terfokus pada penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang penyediaan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas studi pada sekolah luar biasa (SLB) pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan bagaimana penyandang disabilitas dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir/Hadist:

- Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan Shahih Muslim*, Daar Ibnu Katsir, 1423 H.
- Al-Mahalli, *Imam Jalaludin As-Suyuti dalam Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya*, Semarang : Pt. Karya Toha Putra, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Syamil Quran Yasminaal-Quran, Terjemah, dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. Ke Empat, (Jakarta: Gramedia, 2008
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunya Ayat Al Qur'an*, Cet 1, Jakarta :Gema Insani, 2008.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Sigma, Bogor, 2007.
- Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Beirut: ar-Risalah, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahiih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Daar Ibnu Katsir, 1423H.

Buku:

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung : Citra Ditya 2014.
- Ahmad Takwim, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental*, Semarang : Walisongo Press, 2009.
- Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta : Javalitera, 2012.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, ctk. Ketiga, Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2008.

- Aprilina Pawestri, *“Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”*, 2012.
- Ari Pratiwi dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang : Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas, 2016.
- Arni Surwanti dkk, *Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif*, Yogyakarta :Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.
- Azyumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, (Jakarta; Kompas, 2010).
- Bagir Manan dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, 2006.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Naskah Akademik RUU Disabilitas*, 2015.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta :Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Iqbal Muammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)
- Khamami Zada, *“Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Lijan Poltak Sinambela, et.al, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*, Jakarta: Pt. Bumi AKsara, 2010.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marieke Nijland, dkk, *“Anak Unik Informasi tentang Anak-anak Tunagrahita”*, Yogyakarta : Kanwa, 2007.
- Muhammad Afdal Karim, *“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”*, 2014.
- M.Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan:Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum : Universitas Hasanuddin, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Muhammad Hafiz Nur, *“Disabilitas dalam Alquran (Studi Terhadap Kajian Tafsir Tematik)*. 2018.

Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014).

Ngainin Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Bandung: Teras, 2009.

Nunung Aprianto, *Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, Yogyakarta : Javalitera, 2012.

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013).

Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001).

Rosady Ruslan, *“Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi”*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Soeratno, Lincolin Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung :Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Zaenudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 (Ragam Penyandang Disabilitas), dan Pasal 18.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang *Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

Jurnal :

Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Vol. 8, no. 2, Yogyakarta : PALASTREN, 2015.

Dudi Gunawan, *”Modul Guru Pembelajaran SLB Tunarungu Kelompok Kompetensi A”*, (Jakarta: 2016).

Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Pusham UII: Yogyakarta, 2012.

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, 2011, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2018.

Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif*, Jakarta: IDPN Indonesia, Arbeiter-Samariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005.

Prajalani, Yuniviana, dkk., *Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLBNegeri Sukoharjo*". Vol. 04(02, Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS), 2017.

Utomo, "*Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi*", PLB FKIP UNLAM.

Yoga Maulana Ibrahim, *Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*.

Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Universitas lampung, Lampung, 2013.

Wawancara:

Endin, S.Pd., MM Pd, tanggal 17 Oktober 2019, di jam 09:30- 09:45 WIB.

Ilham Al-Arief, Indah Aprilia, M. Bagas Irawan, dan Ulfa Herawati, adalah perwakilan dari Siswa-siswi tingkat SMPLB pkk, Sukrame Provinsi Lampung, pada tanggal 10 Oktober 2019, pada jam 09:00-10:15 WIB.

Leni Frita M., Pada tanggal 3oktober 2019,jam 09:15-09: 25 WIB.

Munir, S. Ag., tanggal 7 Oktober2019, pada jam 09:45-10: 15 WIB.

Rini Andayani, S. Pd.,Tanggal 30 September 2019 jam 10.00-10.15 WIB.

Sudarsono, tanggal 8 Oktober 2019, jam 10:00-10:15 WIB.

Sugeng Rohmad, S.Pd., tanggal 26 September 2019, jam 09:00-09:15 WIB.

Sumber On-line:

<https://islam.nu.or.id/post/read/114155/islam-dan-penguatan-hak-penyandang-disabilitas>, diakses pada hari minggu tanggal 15 Desember 2019 jam 03.35 WIB.

Melalui [iedt.repository.ugm.ac.id/data/S1-2014-296613-introduction.pdf](https://repository.ugm.ac.id/data/S1-2014-296613-introduction.pdf). Diakses Pada tanggal 2 April 2019.

Melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

Propil-slb-pkk-prop Lampung, Diakses Pada tanggal 8 Juli 2019.

